

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Arusani^{*1}, Umar Wirahadi Kusuma², Lisna Ida Harimau³

^{1,2,3} Program Studi Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

*Korespondensi: arusani@itbmwakatobi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received :

28 Juni 2022

Revised :

29 Juni 2022

Accepted :

30 Juni 2022

Online Available :

30 Juni 2022

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Aktifitas

Keywords:

Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Activity Ratio

Licensed Under

a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Abstrak

Penelitian ini dilakukan di pemerintahan kabupaten wakatobi dengan melihat kinerja keuangannya, analisis yang digunakan yaitu menggunakan rasio keuangan adapun hasil penelitaian ini adalah Rasio kemandirian 2008 - 2012 masih termasuk dalam kategori sangat kurang dengan nilai rasio dibawah 10% pertahun atau capaian tertinggi nilai rasio kemandirian adalah 2012 yaitu sebesar 4,77% yang berarti Pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan atau membiayai tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Rasio efektifitas PAD 2008 dan 2012 termasuk kategori sangat efektif dengan nilai rasio diatas 100% atau sebesar 102,82% 2008, 108,17% 2012 yang berarti realisasi PAD melampaui target yang di,tetapkan, 2009 dan 2011 termasuk kategori tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75% atau sebesar 70,83% dan 69,59% yang berarti realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan, 2010 nilai rasio efektifitas sebesar 77,50% yang berarti realisasi PAD hampir mencapai target yang ditetapkan. Rasio aktifitas keuangan tahun 2008, 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa nilai rasio aktifitas diatas 50%, ini berarti Pemerintah lebih memprioritaskan belanja langsung, hanya pada 2012 saja rasio belanja tidak langsung lebih tinggi yang berarti bahwa Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan belanja langsung. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan ketidakstabilan, 2009 PAD menurun sebesar -22,93%, 2010 naik sebesar 43,31%, 2011 menurun sebesar 17,05% dan tahun 2012 naik sebesar 82,22%. Rasio pertumbuhan total pendapatan daerah tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -6,25%, 2010 tumbuh sebesar 2,46%, 2011 tumbuh sebesar 15,85% dan 2012 tumbuh sebesar 5,90%. Dan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2009 sampai 2012 kecuali 2010 mengalami pertumbuhan dengan rasio 24,46% hingga 27,00% sedangkan belanja langsung 2008 sampai 2012 kecuali 2011 mengalami peningkatan antara 3,48% sampai 3,93% pertahun. Rasio kemampuan keuangan dari tahun 2008 - 2012 berada di atas 50% dengan nilai rasio 79,39% sampai 105,20% termasuk dalam kategori sangat baik yang berarti bahwa Pemerintah sudah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Abstract

This research was conducted in the Wakatobi district government by looking at its financial performance, the analysis used is using financial ratios while the results of this research are the independence ratio 2008 - 2012 is still included in the very poor category with a ratio value below 10% per year or the highest achievement of the independence ratio value is 2012 which is 4.77%, which means that the Government has not been able to meet the needs or finance government tasks, development, and social services by relying on its own local revenue. The PAD effectiveness ratio in 2008 and 2012 is included in the very effective category with a ratio value above 100% or 102.82% 2008, 108.17% 2012 which means that the PAD realization exceeds the set target, 2009 and 2011 are included in the ineffective category with a ratio value less than 75% or 70.83% and 69.59% which means that the realization of PAD does not reach the set target, in 2010 the value of the effectiveness ratio is 77.50% which means that the realization of PAD almost reaches the set target. The ratio of financial activity in 2008, 2010 to 2012 shows that the value of the activity ratio is above 50%, this means that the Government prioritizes direct spending, only in 2012 the ratio of indirect spending is higher which means that the Regional Government prioritizes direct spending. PAD growth ratio shows instability, 2009 PAD decreased by -22.93%, 2010 increased by 43.31%, 2011 decreased by 17.05% and in 2012 increased by 82.22%. The ratio of growth of total regional income in 2009 decreased by -6.25%, 2010 grew by 2.46%, 2011 grew by 15.85% and 2012 grew by 5.90%. And the growth ratio of indirect spending in 2009 to 2012 except 2010 grew by a ratio of 24.46% to 27.00%, while direct spending from 2008 to 2012 except 2011 experienced an increase of between 3.48% to 3.93% per year. The financial capability ratio from 2008 - 2012 was above 50% with a ratio value of 79.39% to 105.20% included in the very good category, which means that the Government has been able to implement regional autonomy well.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi tiap daerah di Indonesia. Daerah yang kaya sumber daya alam atau sumber penerimaan dan mengeksplorasinya menyambut dengan penuh harapan, sedangkan bagi daerah yang miskin sumber penerimaan menanggapi dengan sedikit rasa pesimis. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Sehingga mendorong serta menjadikan Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri, baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Ciri yang menunjukkan daerah otonomi mampu berotonomi adalah kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Kabupaten Wakatobi sebagai kabupaten pemekaran tahun 2003, merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang sedang menjalankan otonomi daerah. Selaku Pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di

dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selain itu, pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Wakatobi dengan judul penelitian **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi”**. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio aktifitas dan rasio kemampuan keuangan daerah?

METODE PENELITIAN

Analisa yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal (Halim, 2008:232). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Skala interval kemandirian keuangan daerah:

Tabel 3.1 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50%	Sangat Baik

2. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Halim 2008:234). Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Skala Interval Rasio Efektifitas

Persentase Kinerja Efektifitas	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Dibawah 75%	Tidak Efektif

3. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*)

Menurut Mahmudi (2011:162) Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Rasio pertumbuhan diperoleh dengan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

r = Pertumbuhan

P_n = Data pada tahun n

P_o = Data pada tahun sebelumnya

Untuk mengukur rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Total Pendapatan Daerah
3. Belanja Tidak Langsung
4. Belanja Langsung

5. Rasio kemampuan keuangan daerah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah

dapat mendukung otonomi daerah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KKD = \frac{TPDt}{TBDt} \times 100\%$$

Keterangan :

KKD = kemampuan keuangan daerah

TPDt = total pendapatan daerah tahun t

TBDt = total belanja daerah tahun t

Tabel 3.3 Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01% – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50%	Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. Pendapatan daerah.
2. Belanja daerah.
3. Pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Gambaran umum tentang pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Wakatobi T.A 2008 sampai 2012

Tahun	Pendapatan Daerah			Total Pendapatan Daerah	pertumbuhan. (%)
	PAD	Dana Perimbangan	Lain2 Pend. Yg Sah		
2008	10,899,274,154	311,140,013,070	47,988,724,565	366,379,108,291	-
2009	8,399,417,677	274,282,546,721	60,783,033,519	343,464,997,917	-6,25
2010	12,037,648,730	266,611,915,868	73,292,233,268	351,941,797,866	2,46
2011	9,985,162,160	307,016,783,183	90,738,403,600	407,740,348,943	5,57
2012	18,195,073,103	381,654,733,773	31,971,114,153	431,820,921,029	5,90

Sumber: PPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.1 tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2008 total

pendapatan daerah sebesar Rp.366,379,108,291 pada tahun 2009 menurun menjadi Rp.343.464,997,917 atau mengalami penurunan sebesar -6,25% dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan penurunan nilai PAD dan dana perimbangan sebagai komponen pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap nilai pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 2,46% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena penerimaan dari PAD dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat sedangkan dana perimbangan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2011, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 5,57% dari tahun sebelumnya hal ini karena komponen dari pendapatan yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan sedangkan komponen PAD mengalami penurunan. Tahun 2012 jumlah pendapatan daerah sebesar Rp.431.820.921.029 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,90% dari tahun 2011, hal ini disebabkan karena penerimaan PAD dan dana perimbangan mengalami kenaikan walaupun komponen lain-lain pendapatan yang sah menurun.

Penurunan nilai penerimaan PAD pada umumnya disebabkan oleh masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu penurunan PAD juga disebabkan karena masih rendahnya penerimaan yang bersumber dari perusahaan daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan penerimaan dari komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan dana perimbangan dari tahun ke tahun bervariasi dan mengalami peningkatan dan penurunan juga tergantung dari nilai bagi hasil pusat dan daerah (potensi daerah penghasil), kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan kegiatan daerah yang merupakan prioritas nasional. Sedangkan nilai penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh nilai penerimaan dari komponen lain-lain pendapatan yang sah berupa dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dari tahun ketahun mengalami kenaikan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Struktur belanja daerah mengacu pada Permendagri No.59 Tahun 2007 dimana belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran belanja daerah Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi T.A 2008 sampai 2012

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Pertumbuhan.
2008	101,187,346,728	360,302,853,935	461,490,200,663.00	-
2009	110,184,575,549	271,589,370,371	381,773,945,920.00	-17,27
2010	137,142,325,509	223,819,590,803	360,961,916,312.00	-5,45
2011	174,178,394,697	215,012,373,364	389,190,768,061.00	7.82
2012	187,963,017,593	222,504,115,019	410,467,132,612.00	5.46

Sumber: PPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, menunjukkan bahwa total belanja daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2009 total belanja daerah sebesar Rp. 381,773,945,920 mengalami penurunan sebesar -17,27%. Penurunan nilai dari belanja daerah ini disebabkan oleh penurunan pada belanja langsung. Tahun 2010 pertumbuhan belanja daerah menurun lagi yaitu sebesar -5,45% dari tahun sebelumnya, sekalipun demikian terjadi kenaikan yang signifikan pada nilai alokasi belanja langsung sedangkan belanja tidak langsung mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2011 total belanja daerah tumbuh sebesar 7,82% dimana terjadi kenaikan pada alokasi belanja tidak langsung dan alokasi untuk belanja langsung menurun. Dan pada tahun 2012 total belanja daerah tumbuh sebesar 5.46% dimana terjadi kenaikan pada komponen belanja tidak langsung untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan alokasi untuk belanja langsung juga mengalami kenaikan yang berarti juga alokasi belanja untuk kepentingan masyarakat/publik meningkat.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi

1. Rasio Kemandiria

Kemandirian keuangan daerah atau biasa disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern terutama dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang berarti juga akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi diperoleh Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana yang tampak pada tabel 4.3 Berikut ini

Tabel 4.3 Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah 2008-2012

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat dan Prov.	Rasio Kemandirian	Kategori
2008	10,899,274,154	330,898,470,000	3.29	Sangat Kurang
2009	8,399,417,677	315,028,728,000	2.66	Sangat Kurang
2010	12,037,648,730	314,332,602,332	3.82	Sangat Kurang
2011	9,985,162,160	369,226,501,320	2.70	Sangat Kurang
2012	18,195,073,103	380,895,615,576	4.77	Sangat Kurang

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tabel 4.3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 berada pada kategori sangat kurang, dimana rasio kemandirian dari tahun 2008 sampai 2012 berada

pada skala di bawah 10% dengan nilai rasio yang tidak stabil dimana dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami kenaikan dan penurunan (tidak stabil) dengan nilai rasio paling tinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 4,77% Tahun 2008 nilai rasio kemandirian sebesar 3,29% dan tahun 2009 menurun menjadi 2,66%. Tahun 2010 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wakatobi meningkat menjadi 3,82% sedangkan tahun 2011 menurun lagi menjadi 2,70% dan tahun 2012 naik lagi menjadi 4,77% merupakan nilai rasio tertinggi yang dicapai selama lima tahun terakhir.

Dengan demikian, dari tahun 2008 sampai 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi berada pada kriteria sangat kurang mandiri yang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi belum mampu mencukupi kebutuhan atau membiayai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rasio tersebut juga menggambarkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.

2. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen, semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio efektifitas berarti kemampuan daerah semakin rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi diperoleh rasio aktifitas sebagaimana yang tertera pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2008-2012

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)	Kategori
2008	10,600,250,000	10,899,274,154	102.82	Sangat Efektif
2009	12,011,618,000	8,508,882,995	70.83	Tidak Efektif
2010	15,531,660,947	12,037,648,730	77.50	Kurang Efektif
2011	14,346,685,006	9,985,162,160	69.60	Tidak Efektif
2012	16,820,309,908	18,195,073,103	108.17	Sangat Efektif

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas PAD 2008 sampai 2012 pada Tabel 4.4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas PAD Kabupaten Wakatobi menunjukkan ketidakstabilan. Tahun 2008 dan 2012 rasio efektifitas PAD berada pada kategori sangat efektif dengan nilai rasio di atas 100% yaitu 102,82% dan 108,17% yang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sangat efektif dalam merealisasikan target PAD yang dianggarkan atau realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2010 nilai rasio efektifitas berada pada kategori kurang efektif dengan nilai rasio 77,50%, sedangkan tahun 2009 dan 2011 rasio efektifitas berada pada

kategori tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75% yaitu 70,83% dan 69,60% yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi tidak efektif dalam merealisasikan target PAD yang dianggarkan atau dengan kata lain realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian, untuk meningkat realisasi penerimaan PAD diperlukan adanya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yaitu dengan cara perluasan basis pajak dan retribusi daerah serta penggalan potensi PAD yang dimiliki tanpa mengenyampingkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani. Selain itu juga diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai rasio aktifitas disajikan pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Rasio Aktifitas Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Sampai 2012

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Bel. T.Lang sung	Rasio Belanja Langsun g
2008	101,187,346,728	360,302,853,935	461,490,200,663	21,92	78,07
2009	110,184,575,549	271,589,370,371	381,773,945,920	28,86	71,13
2010	137,142,325,509	223,819,590,803	360,961,916,312	37,99	62,00
2011	174,178,394,697	215,012,373,364	389,190,768,061	44,75	55,24
2012	187,963,017,593	222,504,115,019	410,467,132,612	45,79	54,20

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 4.5 tersebut, rasio aktifitas keuangan daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 nilai rasio aktifitas di bawah 50% berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam mengalokasikan belanja daerah lebih memprioritaskan belanja langsung dengan nilai rasio 78,07% tahun 2008, 71,13% tahun 2009, 62,00% tahun 2010, 55,24% tahun 2011 dan 54,20% tahun 2012, kecuali pada tahun 2012 rasio aktifitas menunjukkan bahwa lebih memprioritaskan belanja tidak langsung dengan nilai rasio aktifitas 45,79%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2008 sampai 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam mengalokasikan belanja daerah lebih memprioritaskan belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program atau kegiatan yang berarti dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung lebih kecil di banding belanja operasional pemerintahan.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Untuk melihat kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio pertumbuhan digunakan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan Daerah, belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Wakatobi.

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi diperoleh rasio pertumbuhan sebagaimana yang tampak pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2008 - 2012

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	10,899,274,154	0,00
2009	8,399,417,677	-22,93
2010	12,037,648,730	43,31
2011	9,985,162,160	-17,05
2012	18,195,073,103	82,22

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD tahun 2009 sampai 2012 menunjukkan kenaikan dan penurunan atau menunjukkan ketidakstabilan, dimana pada tahun 2009 jumlah penerimaan PAD menurun sebesar -22,93% dari tahun sebelumnya sedangkan tahun 2010 meningkat lagi atau tumbuh sebesar 43,31%, dimana kenaikan disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari seluruh komponen PAD terutama dari lain-lain PAD yang sah. Tahun 2011 tidak mengalami pertumbuhan atau menurun lagi sebesar 17,05% dimana penurunan disebabkan oleh penurunan dari komponen PAD yaitu dari penerimaan retribusi dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan tahun 2012 penerimaan PAD tumbuh sebesar 82,22%, dimana kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dari seluruh komponen PAD.

Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi belum mampu mempertahankan dan meningkatkan penerimaan PAD. Hal ini berarti menunjukkan ketidakkonsistenan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan penerimaan PAD. Meskipun demikian, capaian tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir sangat tinggi dengan persentase 82,22% atau Rp.18,195,073,103,-. Kenaikan PAD ini menunjukkan kinerja yang dicapai sudah sangat baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan dan mempertahankan penerimaan PAD ini bukan hal gampang, oleh sebab itu diperlukan adanya upaya Pemda Kabupaten Wakatobi untuk mengidentifikasi dan menggali potensi PAD serta diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dalam menunaikan kewajibannya seperti pajak dan retribusi daerah.

b. Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan total pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi diperoleh rasio pertumbuhan sebagaimana yang tampak pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah 2008-2012

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	366,379,108,291	0,00
2009	343,464,997,917	-6,25
2010	351,941,797,866	2,46
2011	407,740,348,943	15,85
2012	431,820,921,029	5,90

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 tersebut, rasio pertumbuhan total pendapatan daerah dari tahun 2008 sampai 2012 tidak mengalami pertumbuhan atau menurun pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami pertumbuhan. Tahun 2009 rasio pertumbuhan total pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi menurun sebesar -6,25% dari tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2010 sampai 2012 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun kenaikannya tidak sama besar tiap tahunnya. Tahun 2010 total pendapatan daerah naik sebesar 2,46%, tahun 2011 naik sebesar 15,85% dan tahun 2012 naik sebesar 5,90%. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya komponen pendapatan daerah seperti dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah serta PAD.

c. Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi diperoleh rasio pertumbuhan sebagaimana yang tampak pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Sampai 2012

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Pertumbuhan	Belanja Langsung	Pertumbuhan
2008	101,187,346,728	0,00	360,302,853,935	0,00
2009	110,184,575,549	8,89	271,589,370,371	-24,62
2010	137,142,325,509	24,46	223,819,590,803	-17,58
2011	174,178,394,697	27,00	215,012,373,364	3,93
2012	187,963,017,593	7,91	222,504,115,019	3,48

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 2009 belanja tidak langsung naik sebesar 8,89% sedangkan belanja langsung menurun -24,62% yang berarti terjadi penurunan kinerja dalam hal penyediaan sarana dan prasarana publik. Tahun 2010 belanja tidak langsung naik sebesar 24,46% sedangkan belanja langsung menurun sebesar -17,58% dengan jumlah alokasi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, yang berarti terjadi

perbaikan kinerja dalam hal penyediaan sarana dan prasana untuk kepentingan publik. Tahun 2011 belanja tidak langsung meningkat sebesar 27,00% sedangkan belanja langsung naik sebesar 3,93% dengan jumlah alokasi belanja tidak langsung masih lebih besar dar belanja langsung, yang berarti terjadi penurunan kinerja pada belanja langsung karena tidak dapat mempertahankan pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2010 sedangkan pada belanja tidak langsung meningkat karena adanya penambahan belanja pegawai. Tahun 2012 belanja tidak langsung meningkat sebesar 7,91% sedangkan belanja langsung hanya naik sebesar 3,48% dengan jumlah alokasi belanja tidak langsung masih lebih besar daripada belanja langsung, yang berarti terjadi penurunan kinerja dalam hal penyediaan sarana dan prasarana publik.

5. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio kemampuan keuangan daerah merupakan rasio untuk mengetahui seberapa jauh kondisi keuangan daerah dapat mendukung otonomi daerah, apakah daerah sudah mampu melaksanakan Otonomi Daerahnya dengan baik atau belum. Kemampuan keuangan daerah juga dijadikan sebagai tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas ekonomi, disamping tolak ukur lainnya seperti kemampuan sumber daya daerah, kondisi demografi dan partisipasi masyarakat serta potensi-potensi daerah lainnya

Dari hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi diperoleh nilai rasio kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang tampak pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah 2008 - 2012

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah	Rasio (%)	Kategori
2008	366,379,108,291	461,490,200,663	79,39	Sangat Baik
2009	343,464,997,917	381,773,945,920	89,96	Sangat Baik
2010	351,941,797,867	360,961,916,312	97.50	Sangat Baik
2011	407,740,348,943	389,190,768,061	104.76	Sangat Baik
2012	431,820,921,029	410,467,132,612	105.20	Sangat Baik

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wakatobi 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut, rasio keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi menunjukkan kenaikan setiap tahun. Tahun 2008 nilai rasio menunjukkan nilai adalah 79,39%, hingga tahun 2012 nilai rasio naik sebesar 25,81% atau 105,20% pada tahun 2012 kategori sangat baik dengan nilai rasio di atas 50%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 sudah sangat baik dengan nilai rasio rata-rata di atas 50% pertahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wakatobi sudah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik walaupun dari tahun 2008 sampai 2010 total belanja daerah masih lebih tinggi dibandingkan total pendapatan daerah, sedangkan tahun 2011 dan 2012 total pendapatan daerah meningkat dengan rasio sudah melampaui total belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 masih termasuk dalam kategori sangat kurang dengan nilai rasio dibawah 10% pertahun atau capaian tertinggi nilai rasio kemandirian adalah tahun 2012 yaitu sebesar 4,77% yang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi belum mampu mencukupi kebutuhan atau membiayai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya sendiri.
2. Rasio efektifitas PAD tahun 2008 dan 2012 termasuk kategori sangat efektif dengan nilai rasio diatas 100% atau sebesar 102,82% tahun 2008, 108,17% tahun 2012 yang berarti realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan, tahun 2009 dan 2011 termasuk kategori tidak efektif dengan nilai rasio kurang dari 75% atau sebesar 70,83% dan 69,59% yang berarti realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan, tahun 2010 nilai rasio efektifitas sebesar 77,50% yang berarti realisasi PAD hamper mencapai target yang ditetapkan.
3. Rasio aktifitas keuangan daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2008, 2010 sampai 2012 menunjukkan bahwa nilai rasio aktifitas diatas 50%, ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi lebih memprioritaskan belanja langsung, hanya pada tahun 2012 saja rasio belanja tidak langsung lebih tinggi yang berarti bahwa Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan belanja langsung.
4. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan ketidakstabilan, tahun 2009 PAD menurun sebesar -22,93%, 2010 naik sebesar 43,31%, 2011 menurun sebesar 17,05% dan tahun 2012 naik sebesar 82,22%. Rasio pertumbuhan total pendapatan daerah tahun 2009 mengalami penurunan sebesar -6,25%, tahun 2010 tumbuh sebesar 2,46%, tahun 2011 tumbuh sebesar 15,85% dan tahun 2012 tumbuh sebesar 5,90%. Dan rasio pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2009 sampai 2012 kecuali tahun 2010 mengalami pertumbuhan dengan rasio 24,46% hingga 27,00% sedangkan belanja langsung tahun 2008 sampai 2012 kecuali tahun 2011 mengalami peningkatan antara 3,48% sampai 3,93% pertahun.
5. Rasio kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dari tahun 2008 sampai 2012 berada di atas 50% dengan nilai rasio 79,39% sampai 105,20% termasuk dalam kategori sangat baik yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sudah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN DAERAH. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2001. MANUAL AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH, BPFE, Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Erlangga. Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK EDISI 2. Salemba Empat. Jakarta

- Halim, Abdul. 2002. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH EDISI REVISI. UPPUMPYKPN. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH EDISI REVISI. UPPUMPYKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, UII Press, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. OTONOMI DAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH :GOOD GOVERNANCE, DEMOCRATIZATION, LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT. EDISI BAHASA INDONESIA. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nurhayani. 2010. ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU-RENGAT. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Pekanbaru
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA